

**EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO RUMAH TANGGA
MISKIN (PUM-RTM) di LEMBAGA KEUANGAN MIKRO MASYARAKAT
(LKMM) AMANAH DESA BITING KECAMATAN ARJASA KABUPATEN
JEMBER TAHUN 2011**

*(Evaluation of Empowerment For Micro-Enterprises of Poor Household in The
Institution of Society Micro Finance (LKMM) Amanah at The Village of Biting
Arjasa Subdistrict Jember Regency in 2011)*

Dewi Fajar Dening Aprilliya, Inti Wasiati, Selfi Budi H.
Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: DPU@unej.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan Evaluasi dari Pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin di Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat Amanah, Desa Biting, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember Tahun 2011. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan informan dan penggalian data primer dan sekunder. Uji keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi, dimana peneliti membandingkan data satu dengan data lainnya sehingga mendapatkan data yang sah. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada *process implementation evaluation* (evaluasi atas proses atau implementasi) program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan simpan pinjam yang ada pada Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat Amanah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan evaluasi formal jenis evaluasi formatif dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin.

Kata kunci: Evaluasi, Program, LKMM

Abstract

The purposes of this observation is for knowing and describe the evaluation from The Implementation of Empowerment programs for Micro-Enterprises of Poor Household in the Institution of Micro Finance Amanah at the Biting village Arjasa subdistrict Jember Regency 2011. Type of this observation is descriptive qualitative with informant and investigating primary and secondary data. Test validity data in this observation by using triangulation, where the observer compare a data with the other untill get validity data. In this observation the observer focuss on the process implementation evaluation of empowerment programs for micro-enterprises of poor household. Therefore, the observer will checking twice the implementation of save loan that running in The Institution of Micro Finance Amanah. This observation done by using evaluation formative with holding at the rules of the implementation of Empowerment Program for Micro-Enterprises of poor household.

Keywords: : Evaluation, Program, LKMM

Pendahuluan

Evaluasi program penting dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu program pembangunan. Dengan evaluasi, efektifitas dan efisiensi suatu program dapat diketahui dan dapat menilai suatu proyek, serta dapat mengetahui cara yang efektif untuk mencapai tujuan suatu program. Salah satu tujuan evaluasi program adalah menghasilkan informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, maupun penyusunan program berikutnya. Agar informasi dapat berjalan secara maksimal, maka informasi yang dihasilkan harus lengkap, valid dan *reable* secara tepat waktu dalam penyampaiannya.

Dalam pelaksanaan suatu program, tidak selalu mengalami keberhasilan seperti yang telah direncanakan dan seringkali mengalami kegagalan. Dalam mencapai sasarannya. Dengan evaluasi akan diketahui faktor penyebab kegagalan sehingga dapat segera dicari solusi-solusi agar ke depannya tidak mengalami kesalahan yang sama dan dapat lebih baik lagi dalam pengimplementasian program. Tidak hanya faktor penyebab kegagalan saja dapat diketahui, tetapi juga keberhasilan-keberhasilan dari pelaksanaan program dapat diketahui yang selanjutnya akan dikembangkan dan akan dijadikan contoh atau pedoman bagi pelaksanaan program selanjutnya.

Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah yang memiliki pengusaha mikro. Sayangnya mereka menghadapi masalah yang besar. Mereka sulit untuk mengakses permodalan untuk usahanya. Pada umumnya mereka mengalami permasalahan seperti agunan, perijinan, hingga kelayakan usaha ketika mencoba mengakses modal usaha melalui lembaga keuangan (Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember, 2007:2). Di sisi lain, sulitnya keluarga miskin yang mengelola usaha mikro dalam mengakses sumber permodalan dikarenakan oleh:

- a. "terbatasnya alternatif sumber permodalan di wilayah domisili Gakin;
- b. keberadaan rentenir;
- c. bank formal tidak memihak pengusaha mikro Gakin (*bankable/fiseable*)" (Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember, 2009:29).

Rumitnya masalah yang di hadapi oleh pengusaha mikro rumah tangga miskin terutama dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan usaha membuat mereka menghadapi permasalahan yang kompleks. Kompleksitas masalah yang dihadapi rumah tangga miskin itu tidak memungkinkan bagi mereka untuk berusaha sendiri-sendiri dalam menyelesaikan masalah tersebut. Mereka harus bersatu dan berkelompok, di sisi lain mereka membutuhkan institusi yang dapat dipercaya untuk membantu dan mengentaskan mereka dari masalah kemiskinan (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Jember, 2005:4).

Merespon kondisi dan ketidakberdayaan masyarakat miskin dari golongan pengusaha mikro tersebut Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember termotivasi untuk melakukan suatu tindakan. peneliti hanya memfokuskan pada program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin. Alasan peneliti memilih program tersebut karena PUM-RTM adalah program yang berkesinambungan yang

tidak bersifat karitas. Program ini merupakan kegiatan yang didesain untuk tujuan pengentasan kemiskinan dengan strategi peningkatan pendapatan rumah tangga miskin (*income generating*).

Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin merupakan "inovasi dirancang secara khusus dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga dengan mengembangkan usaha mikro sebagai alternatif usaha sampingan, berbasis pada penguatan institusi, berorientasi pada keberlanjutan serta menyentuh langsung wajah keluarga miskin" (<http://mirfano.com>).

Latar belakang pemerintah Kabupaten Jember dalam mengeluarkan kebijakan penanggulangan kemiskinan terutama melalui program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) ini karena seperti kita ketahui bahwa permasalahan terbesar dari usaha mikro dan kecil selama ini adalah sulitnya mereka untuk mendapatkan modal usaha (*start up Capital*) modal awal. Apabila dibandingkan dengan usaha menengah ke atas, mereka lebih mampu mengakses ke lembaga keuangan seperti bank sebagai penyedia modal, hal ini lebih dikarenakan karena mereka memiliki agunan atau *collateral* yang cukup. Sedangkan apabila usaha mikro dan kecil ingin mengakses lembaga keuangan yang sama, mereka banyak mengalami kesulitan dan hambatan baik pada masalah agunan, perijinan maupun kelayakan usaha. Sehingga mereka lebih memilih mengakses ke Bank harian yang biasa disebut rentenir yang bunganya sangat tinggi dan memberatkan.

Tujuan dibentuknya program LKMM adalah untuk Mewujudkan kemandirian dan kapabilitas komunitas (PokMas) dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi. Sehingga dengan adanya program ini diharapkan Rumah Tangga Miskin tidak lagi menjadi obyek amal yang akan menimbulkan ketergantungan kepada pemberi amal. Program ini memfokuskan sasaran pada kaum perempuan, khususnya pada ibu rumah tangga miskin. Dengan alasan, bukan saja karena upaya untuk meningkatkan peranan ibu (gender), akan tetapi bahwa adanya pendapatan tambahan keluarga oleh ibu-ibu akan secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Target sasaran perlu dikelompokkan sebagai Kelompok Masyarakat (PokMas) yang di dalamnya target secara bersama-sama dapat mempelajari dan mengembangkan kemampuannya dalam berbagai aspek inovasi, kreatifitas dan memupuk rasa saling percaya.

Dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) LKMM, telah disebutkan di atas juga bahwa sasaran pada program ini adalah harus wanita dan harus punya usaha. Namun pada kenyataannya temuan peneliti bahwa ada anggota LKMM yang tidak mempunyai usaha dan ada anggota LKMM yang berjenis kelamin Pria. Kemudian, permasalahan yang ditemukan pada LKMM Amanah ini adalah adanya anggota berasal dari desa lain. Hal ini menarik mengingat bahwa tujuan awal di keluarkan kebijakan program ini adalah supaya ibu rumah tangga dapat membantu perekonomian suami atau menambah pemasukan keuangan keluarga. Meskipun ini dinilai efektif agar uang yang dipinjamkan itu tetap bisa berputar kembali. Namun, ini tetap saja dinilai salah karena telah keluar dari aturan yang sudah ditentukan

oleh pihak aparaturnya Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember.

Berdasarkan uraian di atas yang melatarbelakangi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kajian *on going evaluation* yang berfokus pada evaluasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan pinjaman dengan perencanaan pinjaman yang telah ditentukan pada Petunjuk Teknis Operasional. Dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana pelaksanaan mekanisme simpan pinjam dari tahap pengajuan, tahap realisasi dan tahap pengembalian pinjaman di LKMM Amanah desa Biting Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Tahun 2011. Sehingga, dengan demikian penulis mengambil judul "Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin di LKMM Amanah desa Biting Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Tahun 2011".

Metode Penelitian

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah dalam penelitian, penelitian ini memfokuskan pada *process implementation evaluation* (evaluasi atas proses atau implementasi) program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan simpan pinjam yang ada pada LKMM Amanah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan evaluasi formal jenis evaluasi formatif dengan berpedoman pada PTO Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin.

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2006:35) bahwa Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Suatu penelitian yang berusaha menjawab pertanyaan.

Tipe penelitian deskriptif menurut Narbuko dan Acmadi (2003:44) yaitu, "penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan." Sedangkan mengenai paradigma kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006:4) menyatakan bahwa "Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati".

Dengan demikian, penelitian dengan penelitian tipe deskriptif dengan paradigma kualitatif adalah penelitian yang mengungkapkan fakta apa adanya dengan suatu obyek, gejala, maupun keadaan dengan menggambarkan, menguraikan, dan menginterpretasikan ke dalam suatu bentuk tulisan yang sistematis. Dengan pendekatan ini diharapkan temuan-temuan empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci dan jelas.

Alasan penggunaan jenis penelitian deskriptif dengan paradigma kualitatif dalam penelitian ini adalah peneliti berusaha mengungkapkan apa adanya mengenai fakta yang ada di lapangan. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan angka-angka. Meskipun terdapat data berupa angka, tetapi dalam penelitian ini penggunaannya hanya sebatas sebagai penjelas dan penegas saja. Dengan tipe

penelitian yang digunakan, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan hasil penelitian evaluasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin di LKMM Amanah Desa Biting Kabupaten Jember tahun 2011.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan lokasi penelitian di Desa Biting Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Dengan alasan bahwa Desa Biting merupakan sebagai desa yang dikenai program.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive dalam pengambilan informan, yaitu dengan cara penunjukan secara langsung informan yang dipilih oleh peneliti yang bersandar kepada kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, adapun kriteria penentuan informan primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari pihak pemerintah:
 - Kepala Sub Bidang, Usaha Mikro Kecil dan menengah Kabupaten Jember Bapak Agus.
2. Dari pihak pelaksana kebijakan:
 - Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bapak Totok
3. Dari unsur masyarakat:
 - Pengurus LKMM Bapak Suwanto.
 - Anggota Kelompok Masyarakat (PokMas) Bapak Bay, Ibu Arif Sutik dan Ibu Mul

Kriteria di atas merupakan informan yang memberikan jasa informasi dalam penelitian ini. Dengan harapan bahwa informasi yang disampaikan kepada peneliti benar-benar valid dan teruji ke absahannya. Informan dalam penelitian ini informan primer berjumlah 6 orang. Di hentikannya proses penggalian data oleh peneliti dikarenakan adanya kejenuhan data atau informasi yang diperoleh oleh peneliti terhadap persoalan evaluasi program pemberdayaan usaha mikro rumah tangga miskin di Desa Biting Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Tahun 2011.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer menggunakan teknik wawancara dan observasi partisipatif.
2. Data Sekunder yang digunakan adalah dokumentasi berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif. Analisis interaktif merupakan suatu model analisis data kualitatif yang dibuat oleh Miles dan Huberman dan untuk teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi. Menurut Moleong (2005:330) menyatakan bahwa "triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu". Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti menemukan beberapa tahapan proses pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-

RTM) di Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) Amanah desa Biting Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Tahun 2011.

1. Tahap Pengajuan Pinjaman

a. Konsultasi tata cara pengajuan kredit

Dalam tahap pengajuan pinjaman ini berkaitan dengan sejauh mana pencapaian tujuan sebagaimana dirumuskan oleh program. Dalam pelaksanaan proram bila dilihat dari cara perekrutan anggota sampai dengan tahapan-tahapan yang lain yang ada pada tahap pengajuan pinjaman ini tidak berjalan efektif. Hal ini dilihat dari hasil wawancara yang diperoleh kesimpulan bahwa dalam perekrutan anggota tidak sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan oleh Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember. Ada tujuh syarat untuk menjadi anggota yang diberikan oleh Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember. Namun, sebagian besar dari syarat-syarat yang ada tidak dijalankan oleh pengurus LKMM sebagaimana mestinya.

b. Menerima dan mencatat permohonan pinjaman

Setelah para anggota terbentuk dalam satu wadah yang dinamakan Kelompok Masyarakat (PokMas) maka kemudian masuk ke dalam tahap selanjutnya. Kelompok Masyarakat tadi yang sudah mengajukan pinjaman kemudian akan di terima dan di catat oleh pengurus LKMM. Untuk mengetahui secara jelas tentang tahapan ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Agus selaku Kasi UMKM beliau menjelaskan bahwa pada tahapan ini sudah jelas harus dilaksanakan tanpa ada pengecualian.

Kemudian hal yang sama juga dituturkan oleh Bapak totok beliau menuturkan bahwa tahap ini merupakan tahap penting dan harus dilaksanakan. Pencatatan dilakukan agar pembukuan tidak terjadi kesemrawutan. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa jika ada catatan maka diharapkan pengurus bisa mengira-ngira pengeluaran uang yang harus disiapkan. Kemudian Pak Suwanto juga menjelaskan bahwa semua anggota yang melakukan permohonan pinjaman kita catat. Ini agar kita tahu *ooo* orang ini mintanya sekian orang itu mintanya sekian begitu. Kita bisa mengira-ngira uangnya itu cukup apa tidak untuk anggota yang melakukan pengajuan pinjaman itu.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pada tahap ini sudah dilakukan sesuai dengan Petunjuk pelaksanaan LKMM. Sehingga diharapkan dengan adanya tahap ini pembukuan simpan pinjam dapat berjalan dengan lancar.

c. Meneliti Kelayakan Usaha Pinjaman

Dalam memberikan pinjaman, wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman. Agar berjalan lancar dan tidak terjadi tunggakan yang mengakibatkan kerumitan usaha simpan pinjam di kemudian hari, maka sebelum realisasi / pencairan pinjaman perlu diadakan kajian terhadap calon peminjam yang membutuhkan pinjaman.

Namun yang terjadi dalam pelaksanaan dari LKMM Amanah tidak sesuai dengan buku pedoman petunjuk pelaksanaan. Pengurus yang seharusnya melakukan kajian kelayakan pinjaman kepada anggota itu tidak dilaksanakan. Beliau mempunyai alasan tersendiri kenapa tidak kelayakan pinjaman ini tidak dilaksanakan. Beliau berpendapat bahwa

karena beliau sudah mengetahui keadaan dari pada anggota LKMM tersebut. Sehingga, dengan tidak melaksanakan kajian kelayakan pinjaman anggota beliau sudah mengetahui akan diberi pinjaman berapa anggota yang tadi sudah melakukan pengajuan pinjaman.

d. Minta Persetujuan Pada Rapat Kelompok

Setelah tahap meneliti kelayakan usaha calon peminjam sudah dilakukan maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah minta persetujuan pada rapat kelompok. Rapat ini membahas tentang hasil analisis dari kelayakan usaha calon peminjam apakah pinjaman yang mereka ajukan sesuai dengan pengembangan usaha mereka dan apakah mereka mampu mengembalikan pinjaman sesuai dengan batas yang telah ditentukan.

Sesuai dengan pernyataan dari responden yang di dapat dari peneliti makadapat disimpulkan bahwa pengurus tidak mengikuti standart yang sudah diberikan oleh aparatur Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember. Pengurus LKMM berpendapat bahwa yang dilakukan pihak Dinas hanya akan menambah keruwetan dalam LKMM saja sehingga beliau memilih untuk tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh aparatur Dinas Koperasi UMKM. Melihat kondisi seperti ini sebenarnya sangat disayangkan sekali. Mengingat bahwa tujuan awal dari aparatur dinas koperasi memberikan aturan hanya ketua anggota saja yang datang ke kantor adalah agar simpan pinjam yang terjadi dapat berjalan lebih efektif.

2. Tahap Realisasi Pinjaman

a. Menjadi saksi perjanjian pinjaman dan perjanjian jaminan antara kelompok dengan anggota kelompok

Setelah melakukan rapat dan memutuskan berapa besar pinjaman yang bisa diberikan kepada para anggota PokMas maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah menjadi saksi perjanjian pinjaman dan perjanjian jaminan antara kelompok dengan anggota lainnya.

Dari hasil yang didapat dari responden maka peneliti dapat disimpulkan bahwa pada tahap ini memang dilaksanakan. Namun, pada saat ditanya apakah setiap melakukan pengajuan pinjaman tahap ini dilakukan? Informan sekaligus sasaran program mengatakan bahwa perjanjian – perjanjian tersebut hanya dilakukan waktu awal melakukan pengajuan pinjaman saja. sedangkan anggota yang sudah pernah melakukan pinjaman tidak akan diwajibkan untuk melaksanakan perjanjian-perjanjian tersebut. Memang yang dilakukan pengurus ini lebih efektif namun peneliti meragukan akan kesolitan akan kelompok masyarakat. Mengingat pada tahap sebelumnya pengurus menyatakan bahwa setiap melakukan pengajuan pinjaman kelompok masyarakat berubah-ubah. Sehingga dengan tidak adanya perjanjian kepada setiap kelompok masyarakat ini peneliti meragukan akan adanya kesolitan setiap kelompok masyarakat.

Kemudian pelaksanaan pada tahap realisasi ini tidak berjalan sesuai dengan buku pedoman petunjuk pelaksanaan yang telah di keluarkan oleh Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember. Saat ditanya apakah ada perjanjian jaminan dari aparatur dinas, pengurus sampai anggota kompak menjawab tidak ada. Saat ditanya alasan mengapa tidak diadakannya perjanjian jaminan pihak aparatur dinas menuturkan kalau jaminannya itu tidak berupa barang

namun berupa sanksi social. Sedangkan pengurus LKMM menjelaskan karena mereka sudah mengetahui kondisi perekonomian anggota sehingga mereka sudah bisa mengira-ngira akan mendapat pinjaman berapa.

b. Mencatat transaksi kredit yang telah terjadi, termasuk jumlah kredit dan perkembangannya, simpanan wajib pinjam, simpanan tanggung renteng.

Berdasarkan penjelasan dari responden maka dapat diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah dengan sasaran program tidak berhasil. Hal ini terlihat adanya salah satu anggota yang tidak mengerti sekali tentang sistem tanggung renteng. Bahkan di dalam LKMM Amanah desa Biting Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sistem tanggung renteng ini sama sekali tidak dijalankan hal ini dikarenakan masyarakat kurang mengerti arti dan tujuan dari sistem tanggung renteng itu sendiri.

c. Dalam praktrek, penerima uang sering dikuasakan kepada ketua kelompok masyarakat (pokmas)

Setelah tahap pencatatan dilakukan tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah merealisasikan uang yang akan dipinjam oleh calon anggota. Dalam tahap ini uang pinjaman direalisasikan kepada ketua PokMas lalu ketua PokMas merealisasikan kepada anggota PokMas dengan menerbitkan tanda terima pinjaman (kwitansi) sebagai tanda bukti syahnya penyaluran kepada anggota.

Dari data yang sudah didapat dari peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari tahap tersebut tidak mempunyai dampak negative. Meskipun tidak menimbulkan dampak negative namun ini tetap saja dinilai menyalahi standart penilaian yang sudah dibuat oleh Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember. Namun, dengan melihat kondisi permasalahan tersebut yang begitu kompleks dan juga melihat alasan pengurus dengan keterpaksannya untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak boleh.

Peneliti juga menyimpulkan bahwa apa yang sudah menjadi kebijakan pengurus ini sebenarnya tidak efektif mengingat karena yang datang ke kantor tidak banyak ketua kelompok saja melainkan semuanya bersama-sama dengan anggotanya juga. Karena sebenarnya tujuan awal ditunjuknya ketua saja yang datang ke kantor untuk menerima uang pinjaman kemudian dibagikan kepada anggota adalah agar dalam pelaksanaannya ini berjalan efektif. Si anggota juga bisa tetap melakukan rutinitas biasanya yaitu berjalan tanpa meninggalkan pekerjaannya itu untuk datang ke kantor. Akan tetapi jika yang datang ke kantor hanya si ketua kelompok masyarakat saja ini nanti malah akan menjadi masalah baru dalam LKMM tersebut. Karena uang yang seharusnya menjadi hak milik anggota dicurigai bisa jadi akan ditilep oleh ketua kelompok masyarakat. Sehingga, nantinya akan menimbulkan dampak negative kepada si ketua kelompok masyarakat. karena hutang yang seharusnya mereka hanya mampu mengembalika sekian itu menjadi membeludak.

d. Pada rapat kelompok berikutnya melaporkan semua transaksi kredit dan posisi keuangan kelompoknya.

Pada tahap rapat kelompok melaporkan semua transaksi kredit dan posisi keuangan kelompoknya merupakan bagian penting dalam mekanisme penyaluran pinjaman ini. Hal ini dikarenakan dalam rapat ini pembahasan tertuju tentang posisi keuangan anggotanya, hal ini dilakukan agar antara

ketua kelompok dan anggotanya tidak terjadi kesalah pahaman.

Dari hasil wawancara dari responden maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada tahap realisasi ini yang seharusnya mengambil pinjaman ke kantor adalah ketua kelompok masyarakat saja namun di LKMM ini tidak seperti itu. Ketua dan semua anggota yang sudah melakukan pengajuan pinjaman datang ke kantor untuk mengambil pinjaman. Pada buku pedoman petunjuk pelaksanaan seharusnya yang mengambil hanya ketua saja namun di sini semua dengan anggotanya juga. Dalam hal ini, pengurus memiliki beberapa alasan yang pertama adalah agar uang hasil pinjaman tersebut tidak di tilap oleh ketua kelompok masyarakat saja. Tidak hanya pada tahap mengambil pinjaman tetapi juga pada tahap rapat kelompok berikutnya melaporkan semua transaksi kredit posisi keuangan kelompoknya, semua anggota juga diwajibkan untuk langsung mendatangi kantor.

3. Tahap Pengembalian Pinjaman

a. Menyusun daftar hutang yang telah jatuh tempo: nama, jumlah, tanggal, perjanjian pinjaman, periode, jangka waktunya, bagi anggota yang menunggak diberikan peringatan lisan/tertulis

Menyusun daftar hutang yang telah jatuh tempo ini dilakukan setelah tahap realisasi. Ini dilakukan setiap seminggu sekali. Pengurus merekap data-data anggota yang suda waktunya mengembalikan pinjaman dan yang melakukan realisasi pinjaman. Pada tahap ini pengurus diajarkan untuk belajar menerka-nerka berapa dana yang harus di dapat dan dikeluarkan untuk anggota.

Dari dat responden yang sudah di dapat oleh peneliti maka dapat disimpulkan

bahwa pada tahap ini sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pengurus LKMM melakukan pencatatan anggota yang telah membayar angsuran. hal ini bertujuan agar pengurus dapat merencanakan berapa dana yang harus disiapkan untuk memenuhi pengajuan pinjaman dari anggota. Hal ini dinilai efektif mengingat setiap minggunya banyak anggota yang melakukan pengajuan pinjaman. Sedangkan untuk tunggakan angsuran yang dilakukan anggota. Menurut apparatus Dinas Koperasi UMKM jika system tanggung renteng yang ada pada LKMM ini dijalankan sebagaimana mestinya pasti masalah-masalah tunggakan yang dilakukian anggota tidak akan pernah terjadi. Mengingat keuntungan dari system tanggung renteng ini sangat banyak.

b. Menagih angsuran pinjaman anggota, menerima uangnya, mencatat dan membayarkan ke kelompok berdasarkan data/fakta.

Pada tahap ini coordinator kelompok menagih angsuran pinjaman kepada anggota. Setelah selesai menagih, menerima dan mencatat angsuran pinjaman kemudian hal selanjutnya yang dilakukan coordinator kelompok adalah membayarkan angsuran tersebut kepada pengurus LKMM. koordinator datang ke kantor untuk membayar angsuran yang sudah dibayar oleh anggotanya. Hal ini dilakukan agar anggota yang lain masih bisa melakukan kegiatan yang lainnya, agar efisiensi.

Dari data yang sudah di dapat oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa bahwa dari ke enam tahap hanya satu

saja yang dilaksanakan sesuai dengan buku pedoman Petunjuk Pelaksanaan. Permasalahan yang terjadi pada tahap ini masih sama dengan pada tahap realisasi yakni yang datang ke kantor untuk membayar angsuran adalah semua anggota kelompok masyarakat padahal dalam buku pedoman disebutkan bahwa yang datang ke kantor hanya ketua saja. seharusnya ketua kelompok menagih angsuran anggota kemudian membayarkannya ke pengurus LKMM.

Permasalahan lain yang terjadi adalah masih adanya anggota yang membayar nunggak. Hal ini terjadi dikarenakan tidak dijalankannya system tanggung renteng. Padahal sudah disebutkan pula pada buku pedoman bahwa manfaat dari system ini begitu banyak. Hal ini sependapat dengan yang dijelaskan dengan bapak Agus selaku Kasi Usaha Mikro bahwa jika system tanggung renteng ini dijalankan sebagaimana mestinya maka masalah tunggakan-tunggakan seperti itu tidak akan pernah terjadi. Manfaat lain dari system tanggung ini adalah agar sikap saling otong royong bisa lebih tercipta dan sikap individual pada masyarakat bisa dihilangkan. Pada saat ditanya kenapa kenapa system tanggung renteng ini tidak dilaksanakan pengurus LKMM menjelaskan bahwa system ini hanya akan merepotkan anggotanya saja. karena jika ada satu anggota yang tidak bisa membayar angsuran maka nanti yang akan repot mencarikan pinjaman untuk melunasi angsuran tersebut adalah ketua kelompok masyarakatnya.

c. Pada rapat kelompok berikutnya melaporkan semua transaksi kredit dan posisi keuangan kelompoknya.

Sama halnya pada tahap realisasi, pada tahap pengembalian ketua Pokmas [Kelompok masyarakat] juga mengadakan pertemuan lagi dengan anggota kelompok masyarakat. pada tahap ini tidak dilakukan sesuai dengan buku pedoman petunjuk pelaksanaan. Dalam hal ini pengurus mempunyai alasan agar tidak ada kesalah pahaman dalam pembukuan angsuran anggota. Meskipun pengurus menilai hal ini tidak mempunyai dampak negative pada anggota. Namun, peneliti menilai tahap ini tidak berjalan efektif karena yang datang ke kantor seharusnya hanya ketua kelompok saja sehingga ketua ketua kelompok membayarkan angsuran anggotanya, anggota lainnya masih bisa melakukan kegiatan seperti biasanya.

d. Mengkompensasikan hak-hak anggota untuk melunasi tunggaknya.

Mengkompensasikan hak-hak anggota untuk melunasi tunggaknya adalah merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh pihak Dinas koperasi. Tahap ini dilakukan jika ada salah satu anggota Kelompok Masyarakat (Pokmas) tidak sanggup untuk melunasi pinjamannya.

e. Mengkompensasikan hak-hak kelompok untuk melunasi tunggakan anggotanya.

Sama halnya dengan tahap sebelumnya alasan tahap ini dilakukan karena ada satu kelompok masyarakat (Pokmas) yang tidak sanggup melunasi tunggakan pinjaman. Sesuai dengan data dari responden yang sudah di dapat bahwa sasaran tidak mengetahui dari tahap-tahap pengembalian pinjaman. Hal ini dapat dilihat dari pada saat peneliti bertanya apakah ada kompensasi tunggakan anggota yang menunggak ketiga informan kompak menjawab tidak mengetahuinya. Dengan melihat kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi program seharusnya

dilakukan dengan optimal agar mendapatkan hasil yang optimal juga. Dengan demikian, diharapkan control rutin dari Dinas Koperasi harus bisa lebih diperhatikan lagi.

f. Koordinator kelompok dan anggota penunggak bersamasama menjual barang (jika diperjanjikan) guna pelunasan hutangnya.

Berdasarkan data yang sudah di dapat oleh peneliti maka dapat diketahui bahwa pada tahapan ini diakui oleh pihak Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Jember, pengurus beserta anggota LKMM tidak melaksanakan tahapan ini atau belum pernah terjadi. Dalam hal ini sosialisasi program kembali lagi menjadi masalah yang penting. Hal ini dapat dilihat dari sasaran program yang tidak mengetahui tahapan-tahapan atau prasyarat selama menjadi anggota LKMM. padahal seharusnya masyarakat harus paham betul tentang program itu sendiri sehingga dengan itu masyarakat bisa memberi masukan yang nantinya dapat menyempurnakan program LKMM ini.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari hasil penelitian di lapangan peneliti dapat menyimpulkan mengenai evaluasi pelaksanaan program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) tahun 2011 yang dilaksanakan di desa Biting, kecamatan Arjasa, kabupaten Jember. Kesimpulan yang didapat sebagai berikut.

1. Tahap Pengajuan

Dalam program PUM-RTM yang menjadi tahap pengajuan adalah konsultasi tata cara penajuan kredit, menerima dan mencatat permohonan kredit, meneliti kelayakan kredit, minta persetujuan pada rapat kelompok. Ke empat tahap itu dinilai tidak berjalan lancar. Karena dari ke empat tahap tersebut hanya satu saja yang dilaksanakan sesuai dengan buku Pedoman Petunjuk Pelaksanaan.

2. Tahap Realisasi

Tahap realisasi yang dicapai masih sama seperti pada tahap pengajuan, karena dari ke empat tahap pada tahap realisasi ini berjalan tidak lancar. hasil yang di dapat di nilai tidak sesuai dengan buku Pedoman Petunjuk Pelaksanaan. Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) Amanah desa Biting Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember mempunyai alasan tersendiri terkait tidak melaksanakan pedoman yang ada. Itu semua melihat kondisi anggota dan untuk kelancaran Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat itu sendiri.

3. Tahap Pengembalian

Pada tahap pengembalian pinjaman tidak berjalan dengan lancar karena dari keenam tahap tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Banyak pula sasaran program tidak mengetahui akan tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan.

Saran

Ada beberapa hal yang mungkin perlu di perhatikan dalam menjalankan Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin ini yaitu:

1. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Jember agar lebih memperhatikan masalah-masalah yang ada dalam LKMM, sehingga bisa menyusun Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) yang sesuai dan bisa dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM).
2. Perlunya control langsung yang rutin oleh pihak Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Jember dengan pengurus yang ada di LKMM, agar Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) yang tidak aktif bisa terevaluasi, kemudian untuk LKMM yang aktif bisa menjadi percontohan LKMM lainnya.
3. Di dalam melaksanakan kebijakan tersebut kedepannya diharapkan Dinas koperasi Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) Kabupaten jember lebih terbuka sehingga masukan dan saran dari semua pihak bisa terbuka secara luas demi keberhasilan program yang sudah berjalan.

Ucapan Terima Kasih

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Sasongko, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Ibu Dra. Anastasia Murdyastuti, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Ibu Dra. Inti Wasiati, MM, selaku dosen pembimbing akademik serta dosen pembimbing skripsi yang turut memberikan dukungan, arahan, dan nasehat selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Bapak A. Kholiq Azhari, M.Si, selaku ketua penguji yang telah bersedia untuk menyempurnakan jurnal ini.
6. Ibu Selfi Budi H,S.Sos M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah memberi dukungan, bimbingan, saran, waktu, dan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Mulyono selaku operator Program Studi Administrasi Negara, teman-temanku Agizma, Ari, Revi, Ahyes, Shara, Dwi, Lita terimakasih karena sudah memberikan keramaian dan motivasi selama penulis di Jember.
8. Seluruh Keluarga Besar dan Saudara. Terima kasih atas doanya.

Daftar Pustaka

- [1] Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Jember. 2010. *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Modal Lembaga Keuangan Mikro*

Masyarakat dan Koperasi Pedesaan yang Bersumber dari APBD Kabupaten Jember 2010. Jember.

- [2] Moleong, Lexy. J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- [3] Mutrofin. 2007. *Pengantar Metode Riset Evaluasi Kebijakan, Program, Proyek*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- [4] Rohman, Hermanto.2009.*Monitoring dan Evaluasi: Media pemberlajaran Pengamatan di Lapangan Jember: Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas jember.*
- [5] Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kuaalitatif dan R & D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- [6] Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kuaalitatif dan R & D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- [7] UPT Penerbitan Unej. 2012. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edisi Ketiga Cetakan Kedua. Jember: Jember University Press.